

Pengaruh penerapan ambang batas parlemen terhadap proporsionalitas hasil pemilihan umum di Indonesia = The effect of the implementation of parliamentary threshold on the proportionality of general election results in Indonesia

Terence Cameron, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920552900&lokasi=lokal>

Abstrak

Kebijakan ambang batas parlemen yang diterapkan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia telah menyebabkan banyak partai politik tidak lolos ke DPR, serta banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi dan menjadi terbuang. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya disproportionalitas hasil pemilihan umum serta dapat mengancam kedaulatan rakyat dan asas keadilan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh penerapan ambang batas parlemen terhadap proporsionalitas hasil pemilihan umum di Indonesia serta bagaimana rekomendasi dalam menentukan besaran ambang batas parlemen yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi komparatif untuk mengetahui pengaruh penerapan ambang batas parlemen dalam beberapa pemilihan umum yang pernah diselenggarakan di Indonesia, serta untuk menemukan formula yang tepat untuk menghitung besaran ambang batas parlemen yang dapat meminimalisir disproportionalitas hasil pemilihan umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan indeks Loosemore-Hanby Index (LHI), didapati bahwa penerapan ambang batas parlemen dengan besaran yang tidak didesain dengan rumusan yang terukur telah mengakibatkan tingginya indeks LHI yang mengindikasikan bahwa hasil pemilihan umum DPR di Indonesia tidak proporsional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan besaran ambang batas parlemen dengan menggunakan formula matematis yang tepat. Penulis kemudian mengambil konsep dan formula ambang batas efektif yang dirumuskan oleh Rein Taagepera, dan berdasarkan hasil perhitungan, didapati bahwa besaran ambang batas parlemen efektif untuk pemilihan umum DPR di Indonesia adalah 1% dari total suara sah nasional.

.....The parliamentary threshold policy implemented in determining seats for members of the People's Representative Council (DPR) in Indonesia has caused many political parties failed to enter the DPR, and many voters' votes were not converted into seats and were wasted. This condition caused disproportionality in the general election results and could threaten the people's sovereignty and the principle of fairness in general elections. This research analyzes how the implementation of the parliamentary threshold affects the proportionality of the general election results in Indonesia and how recommendations are made in determining the ideal parliamentary threshold to be implemented in Indonesia. This research is conducted using a normative juridical research method with a comparative study approach to determine the effect of the implementation of parliamentary threshold in several general elections that have been held in Indonesia, as well as to find the right formula for calculating the magnitude of the parliamentary threshold that can minimize the disproportionality of the general election results. Based on research conducted and based on calculations using the Loosemore-Hanby Index (LHI), it was found that the implementation of parliamentary threshold with a magnitude that was not designed with a measurable formula has resulted in a high LHI index which indicates that the results of the DPR general elections in Indonesia are not

proportional. Therefore, it is necessary to formulate the magnitude of the parliamentary threshold using the right mathematical formula. The author then took the concept and formula of the effective threshold formulated by Rein Taagepera, and based on the calculation results, it was found that the magnitude of the effective parliamentary threshold for the DPR general elections in Indonesia is 1% of the total valid national votes.